

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN KE-2

Penguatan Kajian atas Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks
Kependidikan dan Non-Kependidikan

Editor:

Budi Mulyono, M.Pd.

Dr. M. Murdiono, M.Pd.

Halili, S.Pd., M.A.

Iqbal Arpanuddin, M.Pd.

Suyato, M.Pd.

Cetakan pertama, November 2016

x + 856 halaman

21cm x 29,7cm

ISBN: 978-602-73791-0-7

Desain sampul dan tata letak:

Tri Admoko dan Agung Masykuri

Penerbit:

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Bekerjasama dengan:

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia
(AP3Knl) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat redaksi:

Gedung G.01 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Sleman DI Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 548202

Fax. (0274) 548201

Email: labpkn.uny@gmail.com

© all rights reserved

Kata Pengantar

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-NYA lah penyusunan prosiding sebagai bagian dari Konferensi Nasional Kewarganegaraan (KNKn) Ke-2 ini bisa diselesaikan dengan seoptimal yang mungkin diupayakan. Shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Rasul Junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sang pemberi terang dalam perjalanan kehidupan umat manusia.

Prosiding ini merupakan kumpulan dari hampir seluruh makalah yang disajikan oleh para penyaji/presenter dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan ke-2 yang pada tahun 2015 ini mengangkat tema besar "Penguatan Kajian atas Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks Kependidikan dan Non Kependidikan" yang secara keseluruhan berjumlah 64 makalah baik untuk sesi pleno maupun sesi parallel yang dibagi menjadi empat panel yaitu Pendidikan, Politik, Hukum, dan Moral.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantuk kesuksesan penyelenggaraan Konferensi dan penerbitan prosiding Konferensi ini. Sangat banyak pihak yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan Konferensi ini, mulai dari Menristekdikti RI hingga para mahasiswa yang tergabung dalam Lingkaran Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (LinK-DeHAM).

Akhirnya, kami atas nama Komite Eksekutif KNKn berharap bahwa prosiding yang telah disusun dan diterbitkan dengan penuh kerja keras dan kerja cerdas ini dapat bermanfaat untuk memperkuat referensi dan literature ilmiah kajian kewarganegaraan dalam makna sempit di lembaga-lembaga pendidikan dan dalam makna yang luas di keluarga dan masyarakat.

Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam prosiding dan dalam penyelenggaraan Konferensi. Kritik dan masukan para pihak tentu kami sangat harapkan demi perbaikan kualitas prosiding dan penyelenggaraan Konferensi di masa-masa yang akan datang.

Yogyakarta, 17 November 2016
Ketua Komite Eksekutif KNKn,



Budi Mulyono, M.Pd.



Diterbitkan oleh:
Laboratorium PKn FIS UNY



Bekerjasama dengan:
AP3KNI Wilayah DI. Yogyakarta



Mitra Pelaksana:
LinK-DeHAM FIS UNY

PROSIDING **KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN KE-II**

**PENGUATAN KAJIAN ISU-ISU AKTUAL KEWARGANEGARAAN
DALAM KONTEKS KEPENDIDIKAN DAN NON PENDIDIKAN**



Editor:

Budi Mulyono, M. Pd

Dr. Mukhammad Murdiono, M. Pd.

Halili, M. A.

Iqbal Arpanudin, M. Pd.

Suyato, M. Pd.



KNI
KONFERENSI NASIONAL
KEWARGANEGARAAN

**MENAGIH NAWACITA:
POTRET KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROGRAM “INDONESIA PINTAR”
JOKOWI-JK**

Ardian Bakhtiar Rivai
Universitas Ahmad Dahlan
ardian.rivai@ppkn.uad.ac.id

Abstrak

Nawacita merupakan sembilan prinsip dasar yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama lima tahun mengendalikan roda pemerintahan di Indonesia. Studi ini bermaksud memotret tingkat kepuasan mahasiswa dalam mengevaluasi seberapa sukses pelaksanaan Nawacita hingga dua tahun pemerintahan kabinet kerja. Potret ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana program Indonesia Pintar mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia seperti termaktub dalam Nawacita kelima. Dengan menggunakan kuesioner yang disebar langsung kepada mahasiswa, data penelitian ini merupakan eksplorasi kuantitatif yang dianalisis untuk menemukan bagaimana opini publik khususnya dari kalangan mahasiswa tentang kepuasan terhadap terlaksananya Nawacita kelima yang dimanifestasikan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kepuasan yang tinggi dalam keberlangsungan program Indonesia Pintar sebagai ikhtiar membangun Indonesia yang berkemajuan. Studi ini berkesimpulan bahwa program Indonesia Pintar yang mendapat kepuasan tinggi dari publik khususnya kalangan mahasiswa merupakan langkah awal untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia paripurna yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Indonesia Pintar sebagai salah satu program Nawacita, merupakan bentuk kongkrit atas capaian cita-cita Indonesia yang berkemajuan.

Kata Kunci: Nawacita, Opini, Publik.

Pendahuluan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya penilaian publik khususnya pemilih muda terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK di usia satu tahun terpilihnya mereka sejak Pemilu 2014. Dari hasil survei yang akan dilakukan dalam studi ini, diharapkan akan menghasilkan luaran berupa rangkuman data persentase setiap indikator dari penilaian pemilih muda terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Dari hasil data tersebut, diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk bisa menjastifikasi kinerja pemerintahan saat ini secara objektif, akurat, dan ilmiah. Hasil penelitian ini menjadi penting juga untuk memberikan penjabaran empiris tentang pengembangan referensi kepercayaan politik masyarakat khususnya secara spesifik dalam segmen pemilih muda di Yogyakarta.

Menjadi penting untuk menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian ini, karena, Cole (1973) menyebutkan bahwa hilangnya kepercayaan politik terhadap sebuah pemerintahan akan menimbulkan hilangnya sebuah “*democratic idea*” sebagai simbol memudarnya ekspektasi masyarakat kepada pemerintahan Jokowi-JK. Studi ini sangat terinspirasi oleh model “*Postulated Trust Model*” yang diteorisasikan oleh Cole (1973). Ada beberapa komponen berfikir yang menjadi konsideran penelitian ini memahami tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, studi ini berusaha mengkaitkan tentang bentuk kepercayaan politik dengan latar belakang pendidikan pemilih muda dan kepercayaan politik kepada pemerintahan *status quo*.

Produktifitas dan kekuasaan menjadi bahan diskursus yang sangat populer dalam referensi ilmu politik beberapa dekade terakhir. Mengukur kepuasan publik terhadap kekuasaan saat ini jelaslah dengan mengukur dari bagaimana produktifitas yang sudah dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam ukuran indikator yang dipisahkan (Oszlak, 2005). Ukuran yang paling pokok dalam kinerja pemerintahan adalah dengan melihat bagaimana tindakan administratif yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden selama satu tahun ini. Kebijakan administratif dalam rangka menjalankan roda pemerintahan adalah tindakan yang berkaitan erat dengan pengelolaan kapasitas administrasi negara, termasuk bagaimana administrasi tersebut menjadi kontrol untuk merespon birokrasi masyarakat sebagai pangkal dari otoritas tertinggi (Oszlak, 2005).

Dalam penelitian ini, kapasitas kebijakan administratif dimaknai dalam tiga bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum. Namun demikian, hanya bidang pendidikan yang dibahas dalam artikel untuk publikasi pada prosiding ini. Ada dua alasan mengapa ketiga bidang tersebut menjadi isu yang penting dan harus ditangkap dalam survei penelitian ini. Pertama, isu-isu tersebut membutuhkan solusi langsung dari presiden dan wakil presiden untuk bisa diidentifikasi, penyertaan hubungan sebab akibat antara kinerja pemerintahan sebagai instrumen dan menghasilkan solusi atas berbagai permasalahan lainnya yang ditimbulkan akibat ketiga bidang tersebut (Oszlak, 2005). Kedua, bidang-bidang tersebut membutuhkan komitmen langsung dari presiden dan wakil presiden untuk menciptakan agen atau unit pemerintahan yang berkontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah atau kasus yang sedang dihadapi untuk memenuhi misi pemerintahan secara umum.

Metode Penelitian

Penelitian survei ini dilakukan di Universitas Ahmad Dahlan. Jumlah sampel yang digunakan dalam survei ini sebanyak 315 mahasiswa. Dengan menggunakan teknik sampel area (*cluster sampling*) survei ini menangkap responden dengan rincian 185 mahasiswa perempuan dan 130 mahasiswa laki-laki. Taraf kesalahan (*margin of error*) data penelitian diukur sejumlah 5% dengan taraf kepercayaan sebesar 95%. Survei ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang opini publik khususnya dari kalangan mahasiswa. Opini dipotret dalam menilai kinerja kabinet kerja pemerintahan Jokowi JK yang secara spesifik mendeskripsikan opini pada bidang pendidikan (Eriyanto, 2007).

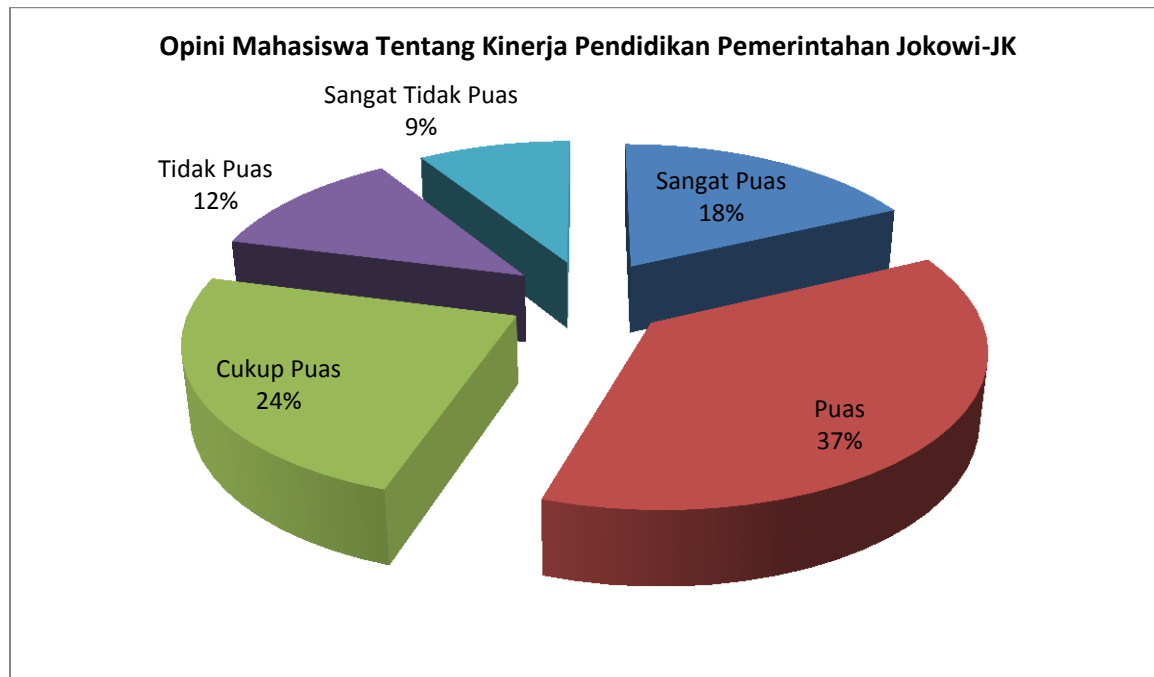
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 21 Mei 2016 dengan menyebar kuesioner ke setiap kelas yang menjadi sampel penelitian dengan terlebih dahulu menjelaskan cara pengisian kuesioner, maksud, dan tujuan penelitian ini dilakukan. Mahasiswa yang menjadi sampel penelitian kemudian diberi kesempatan untuk mengisi kuesioner dengan mempertimbangkan apa yang mereka rasakan, bukan apa yang mereka harapkan. Sehingga, ketercapaian potret opini yang mereka alami lebih valid secara kaidah dan sistematika penelitian.

Adapun sumber dana penelitian ini berasal dari hibah penelitian dosen pemula dari lembaga penelitian dan pengembangan Universitas Ahmad Dahlan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada semacam angin segar dalam atmosfir pemerintahan Jokowi-JK yang terpotret dalam penelitian ini. Pertama, sektor pendidikan memberikan penilaian kepuasan yang tinggi dari pemilih terkait bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang dimanifestasikan oleh menteri pendidikan. Kedua, penilaian atas kinerja pemerintahan di bidang pendidikan yang disimbolkan oleh Kartu Indonesia Pintar menjadi semacam anti tesis bagi kinerja di bidang lain yang dinilai rendah oleh publik saat ini.

Pemikiran ini menjadi menarik untuk difahami bagaimana pula sesungguhnya Anies Baswedan yang saat penelitian ini dilakukan masih menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan mampu memberikan kepuasan publik kepada Jokowi, namun disaat bersamaan juga memberikan sinyal ancaman kepada Jokowi untuk pertarungan di 2019. Sebuah paradoks yang ternyata berimplikasi juga bagi pergantian kabinet jilid dua yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengganti Anies Baswedan dengan Muhajir Effendi sebagai magnet elektoral baru untuk pemerintahan Jokowi.



Gambar 1 Opini Mahasiswa tentang Kinerja Pendidikan Pemerintahan Jokowi-JK

Data penelitian menunjukkan bahwa ada 18% responden yang merasa sangat puas dan 37% merasa puas terhadap kinerja pendidikan. Jumlah ini sangatlah besar untuk mengkonfirmasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja bidang pendidikan yang dipayungi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Adapun publik yang mengambil posisi di tengah dengan opini cukup puas hanya 24%. Sedangkan responden yang tidak puas berjumlah 12% dan responden yang merasa sangat tidak puas hanya 9% saja. Data ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nampaknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK di sektor pendidikan mampu membangun optimisme di benak publik. Kondisi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa program Kartu Indonesia Pintar yang menjadi andalan Jokowi saat kampanye relatif sudah terlaksana dengan baik dan terdistribusi ke seluruh pelosok masyarakat di Indonesia.

Dasar teori yang paling relevan digunakan untuk mengukur bagaimana kepuasan politik publik adalah dengan meminjam konsep yang dijelaskan oleh Stokes; 1962 dalam (Hetherington & Rudolph, 2008) yang menjelaskan bahwa kepuasan politik adalah sebuah orientasi dasar evaluatif di pemerintahan dengan mengetahui bagaimana melaksanakan pemerintahan berdasarkan ekspektasi normatif publik terhadap Jokowi-JK. Memahami kepuasan politik

masyarakat terhadap Jokowi-JK adalah dengan mencermati bagaimana bangunan organisasi politik yang sudah dirintis dan kembangkan oleh Jokowi-JK (Vigoda-Gadot, 2007). Bangunan organisasi politik dapat diurai dalam bentuk internal politik, hubungan kekuasaan, dan pengaruh strategi politik oleh Jokowi-JK (Vigoda-Gadot, 2007).

Studi ini mengukur bagaimana hubungan politik yang dilakukan oleh Jokowi-JK dalam dua alur yang berbeda, yakni hubungan secara vertikal dan hubungan secara horisontal. Hubungan secara horisontal akan diukur secara terpisah antara apa yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai personaliti Presiden dan apa yang dilakukan oleh Jusuf Kalla sebagai personaliti Wakil Presiden dalam dua alur yang terpisah. Namun, dalam rangka mengukur hubungan horisontal, Studi ini memaknai Jokowi-Jk sebagai satu kesatuan institusi organisasi politik yang tak dapat dipisahkan.

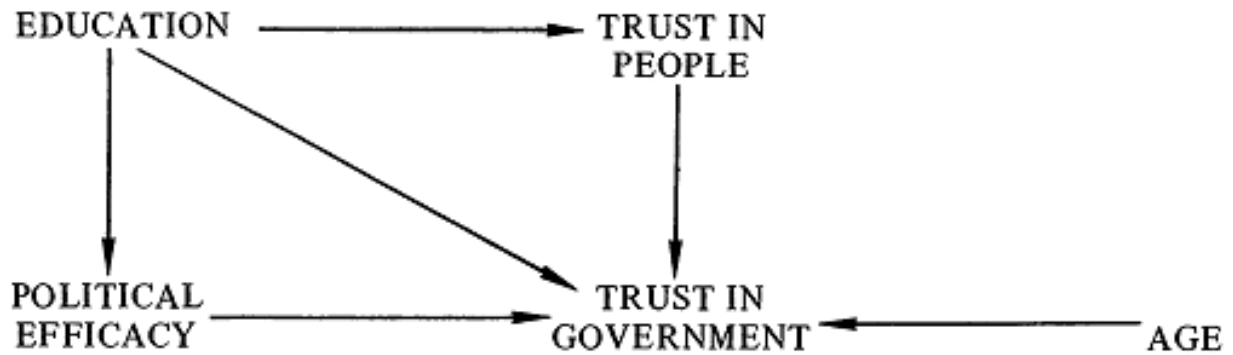
Ada tiga hubungan horisontal oleh Jokowi-JK sebagai institusi politik yang menyatu yang penting untuk diukur. Pertama, hubungan Presiden dan Wakil Presiden dengan lembaga parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang secara politik didominasi oleh partai-partai yang saat pemilu 2014 memiliki pandangan dan posisi yang berbeda dengan pemerintahan. Asumsi ini jelas bisa dibangun dari dominasi pimpinan di DPR yang dikuasai oleh partai-partai politik bukan pendukung pemerintah. Kedua, hubungan horisontal yang juga penting diukur adalah bagaimana Jokowi-JK menjalin komunikasi dan mengelola administrasi politik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai representasi lembaga penegakan hukum di Indonesia, dengan spesialisasi penanganan kasus korupsi. Ukuran ini menjadi penting, karena di awal masa pemerintahan Jokowi-JK sempat digaduhkan dengan kasus kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polisi Republik Indonesia. Kegaduhan hubungan tersebut jelas mempengaruhi kepuasan publik kepada Jokowi-JK khususnya dalam hal kepercayaan politik.

Ketiga, yang tidak kalah penting menjadi ukuran kepuasan politik adalah dengan melihat bagaimana hubungan yang dibangun oleh Jokowi-JK dengan partai-partai politik. (Schwartz & Lawson, 2005). Seperti halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat, ada kecenderungan yang sama dengan yang terjadi di Indonesia, dimana partai politik terkadang menjadi institusi yang membatasi reformasi demokrasi secara langsung. Kecenderungannya, keterbatasan kekuasaan pemerintahan seringkali harus didobrak melalui negosiasi dengan partai politik yang memegang supremasi kekuasaan langsung dari rakyat saat pemilihan umum.

Bentuk lainnya, partai politik juga seringkali menjadi insitusi yang memegang kontrol atas stabilitas politik yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan. Partai politik dan negara sebagai pengendali jalanya pemerintahan memiliki hubungan yang resiprokal (Schwartz & Lawson, 2005). Seperti kita ketahui, partai politik merupakan penghubung antara rakyat sebagai pemilih dengan negara sebagai pemegang kekuasaan yang dilakukan dalam proses pemilihan umum. Partai politik juga menjadi stimulus kepemimpinan politik untuk tata kelola pemerintahan dan memberikan inisiasi program untuk dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK (Schwartz & Lawson, 2005).

Atas dasar betapa pentingnya posisi partai politik dalam rangka mengukur kepuasan politik masyarakat khususnya pemilih muda terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, maka saya merasa penting untuk mengukur kepuasan politik masyarakat dalam dua jalur. Pertama, jalur hubungan komunikasi politik yang dibangun Jokowi-JK kepada partai politik pendukungnya di masa Pemilu 2014 yang sering kita kenal dengan nama Koalisi Indonesia Hebat. Kedua, jalur hubungan komunikasi yang dibangun Jokowi-JK kepada partai politik yang mendukung lawan politiknya saat Pemilu 2014 yang juga sekaligus menguasai kursi di parlemen, yang sering kita kenal dengan nama Koalisi Merah Putih. Kedua jalur hubungan komunikasi tersebut akan saya jadikan indikator yang diukur dalam survei kepuasan publik dalam studi ini.

Secara detail Cole (1973) memahami latar belakang pendidikan masyarakat merupakan awal dari bagaimana mengembangkan kepuasan politik dan kepercayaan masyarakat. Menurut saya, menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian merupakan cara saya dalam menafsirkan bagaimana latar belakang pendidikan yang menurut Cole (1973) tersebut dianggap sebagai hulu dalam model berfikir tentang penelitian kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang sangat menarik dalam model oleh Cole (1973) ini. Pertama, kecenderunganya di Indonesia, mahasiswa merupakan sebuah kelompok di masyarakat yang sangat terbatas jumlahnya. Namun, di saat bersamaan, mahasiswa sebagai kelompok terdidik juga merupakan kelompok masyarakat dengan kelompok usia terbesar di Indonesia.



Gambar 2 *Postulated Trust Model* (Cole, 1973)

Menjadi keharusan bagi peneliti, untuk mempertimbangkan mahasiswa yang menjadi subjek penelitian ini juga sebagai kelompok usia (*age*) golongan muda di Indonesia yang menjadi kelompok pemilih mayoritas di Indonesia. Sehingga, sangat khas kemudian, bahwa studi ini disaat bersamaan menjadi penghimpun persepsi publik tentang kepuasan politik dalam dua ruang sekaligus. Ruang pertama sebagai penampung aspirasi kelompok mahasiswa sebagai representasi kelompok terdidik (*education*) dan mahasiswa sebagai kelompok generasi muda (*age*) disaat yang bersamaan (Cole, 1973).

Yang tidak kalah penting juga dari *Postulated Trust Model* oleh Cole (1973) adalah bahwa latar belakang pendidikan sangat kuat pengaruhnya untuk mengukur bagaimana penilaian kelompok masyarakat seperti ini menginterpretasikan kebijakan publik yang direalisasikan oleh Jokowi-JK dalam bentuk kepuasan politik dan kepercayaan politik masyarakat. Ada dua hal yang harus difahami sebelum menggiring penelitian ini sebagai referensi data ilmiah justifikasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, kepuasan politik masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka menjawab ekspektasi masyarakat yang sangat besar kepada Jokowi sebelum pemilihan presiden yang dilakukan di tahun 2014. Hingar bingar masa Pilpres 2014 dan besarnya harapan masyarakat kepada Jokowi sebagai tokoh pembaharu Indonesia sangatlah menarik untuk diurai dalam studi ini.

Kedua, *Trust in People* merupakan nilai pokok yang sangat mendasar untuk menjawab bagaimana ekspektasi masyarakat yang besar saat sebelum pemilu. Hal ini harus dijawab oleh

Jokowi dengan kepemimpinannya setelah satu tahun. Bukan tidak mungkin, menurunnya kepercayaan di masyarakat kepada Jokowi akan membawa petaka bagi iklim demokrasi di Indonesia. Karena, ekspektasi yang tinggi akan membawa kekecewaan yang tinggi pula di saat bersamaan. Atas dasar logika berfikir yang demikian itu, studi ini sangatlah penting posisinya untuk menjawab disparitas antara ekspektasi dengan realitas pasca satu tahun berkuasa. Di sisi lain, studi ini juga hadir untuk bisa memprediksi bagaimana empat tahun ke depan pola dan relasi kekuasaan yang dibangun untuk membangun *trust* masyarakat tersebut. Tak bisa dinafikan, Jokowi juga tentu harus menjaga *Political Efficacy* dan *Trust* di masyarakat untuk menjaga kekuasaannya di periode ke dua di tahun 2019.

Kepuasan Publik & *Reshuffle* Menteri Pendidikan: Sebuah Analisis Singkat

Menjadi menarik kemudian, melihat hasil kepuasan opini mahasiswa tentang kinerja pemerintahan Jokowi-JK di sektor pendidikan dengan pergantian kabinet (*reshuffle*) yang menyingkirkan Anies Rasyid Baswedan dari kursi empuknya sebagai menteri pendidikan. Fakta ini menjadi menarik untuk dibahas, karena ada semacam paradoks yang ditunjukkan dengan pergantian posisi menteri pendidikan tersebut. Dalam suasana psikologi politik yang menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan bidang pendidikan, justru disaat itu pula pergeseran menteri pendidikan dilakukan. Dalam membaca kondisi yang demikian ini, peneliti menggunakan *retrospective voting model* oleh Chandler (1988) sebagai basis analisis memaknai kondisi politik yang seperti ini. Model ini menjelaskan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki keputusan politik yang sangat ditentukan oleh pengalaman dalam kaitan sosialisasi politik dan pemerintahan (Chandler, 1988).

Atas dasar model retrospektif ini maka bisa diasumsikan bahwa ada semacam kontraproduktif bagi Jokowi sebagai presiden dan sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam kabinet pemerintahan saat ini. Pertama, kesuksesan Anies Baswedan untuk membangun kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan bidang pendidikan. Disatu sisi mendongkrak kinerja pemerintahan Jokowi JK yang dinilai oleh publik. Di sisi lain, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pendidikan juga bisa menjadi ancaman politik bagi Jokowi untuk jangka panjang. Karena, bagaimanapun, politik adalah masalah tentang merebut kekuasaan dan mempertahankan

kekuasaan itu tetap berada di bawah kendali sang penguasa. Dengan kata lain, Anies Baswedan sangat berpotensi menjadi rival politik dengan basis kepuasan publik yang ada saat ini.

Kedua, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja menteri pendidikan yang saat penelitian ini dilakukan masih dijabat oleh Anies Baswedan, akan menimbulkan apa yang disebut sebagai *personality traits* (karakter personal). Adanya karakter personal yang terbangun di dalam diri Anies Baswedan yang berada di bawah mekanisme kepuasan publik akan mendongkrak popularitasnya di mata publik (Schoen & Schumann, 2007). Jika popularitas ini dapat dipelihara dengan baik, bukan hal yang sulit untuk meruntuhkan popularitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana pada pemilu 2019.

Sangat paradoks kiranya jika kepuasan publik terhadap menteri pendidikan dibiarkan tanpa ada kontrol yang kuat oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif di republik ini. Meminjam teori perilaku politik tentang karakter masyarakat *suburban*, ada semacam pengaruh yang kuat dari kelas menengah seperti mahasiswa terhadap pilihan politik di sekitar lingkungan mereka berada (Manis & Stine, 1959). Mahasiswa sebagai representasi kelompok pemuda intelektual dapat mempengaruhi satu sama lain tentang preferensi politik dimana mereka tinggal (Eulau, 1956). Pengaruh ini dibangun dari hasil diskusi dan obrolan sehari-hari yang secara tidak langsung akan ikut berpengaruh juga bagi opini publik secara keseluruhan. Misalnya, kepuasan mahasiswa tentang kinerja pendidikan akan dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dari kalangan lain seperti penjual angkringan, kantin, atau pemilik kos dari obrolan dengan mahasiswa sebagai kelas menengah yang berpengaruh terhadap preferensi publik.

Pertanyaan selanjutnya yang menarik untuk dibahas, mengapa Presiden Joko Widodo mengganti Anies Baswedan dengan Muhadjir Effendi. Ada dua hal yang bisa dijelaskan dari fakta ini. Pertama, selain presiden Joko Widodo harus menyingkirkan Anies Baswedan yang sangat berpeluang menjadi lawan politiknya di 2019, Jokowi juga harus mampu menarik basis massa baru sebagai pendongkrak elektabilitasnya menuju periode kedua pemerintahannya. Dengan memasukkan Muhadjir Effendi dalam kabinet kerja, maka secara otomatis Jokowi akan mendapatkan magnet elektoral baru untuk Pemilu 2019. Muhadjir Effendi yang merupakan salah

satu Pengurus Pusat Muhammadiyah bisa menjadi magnet untuk dukungan suara dalam pemilihan 2019 khususnya dari kalangan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah.

Pemilih Jokowi akan semakin bertambah karena adanya pengalaman sosial yang mendukung proses terbangunya perasaan bersama. Akumulasi dukungan ini dibangun atas identitas dan sistem nilai bersama yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap adanya persuasi dan intervensi organisasi kepada pilihan politik anggotanya (Mair, 2006). Dengan kata lain, dengan memasukkan tokoh Muhammadiyah dalam pemerintahan, maka akan menambah daya dorong mesin politik Jokowi sebagai pendukung keberlangsungan menuju periode kepemimpinan selanjutnya. Terlebih lagi, kekuatan Muhammadiyah yang selama ini belum dimaksimalkan oleh Jokowi sebagai mesin elektoral dan akselerasi pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua, Muhadjir Effendi secara politik tidak memiliki popularitas yang tinggi seperti halnya Anies Baswedan. Sehingga, sangat gampang bagi Jokowi untuk mengandalkan Menteri Pendidikan saat ini agar tidak terlalu “liar” dalam melakukan manuver politik dan menggerogoti popularitas presiden sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi. Itu artinya, Muhadjir Effendi tidak akan berpotensi menjadi “musuh dalam selimut” yang akan mengganggu keberlangsungan periode kepemimpinan ke dua di tahun 2019.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengganti Anies Baswedan dengan Muhadjir Effendi karena kesuksesan membangun kepuasan publik bukanlah sesuatu yang bebas nilai politik. Menghancurkan bibit-bibit kekuatan politik yang sudah ditebar oleh Anies Baswedan adalah sebuah pilihan yang harus diambil oleh Jokowi. Karena, untuk meruntuhkan popularitas politik yang sudah dibangun Anies Baswedan adalah dengan cara membangun atau menarik basis sosial baru seperti Muhammadiyah. Memperluas identifikasi sosial dengan referensi kelompok seperti Muhammadiyah sangat bermanfaat untuk mengelola konsistensi kognitif masyarakat (Houghton, 2009). Dampak yang ditimbulkan oleh konsistensi kognitif seperti kelompok Muhammadiyah yang dibawa oleh Muhadjir Effendi adalah, adanya psikologi politik masyarakat yang akan melakukan pilihan politik dengan apa yang mereka percayai dari organisasi yang menaunginya (Rozell, 2009). Sehingga, masuknya Muhadjir Effendi sebagai bagian politik Jokowi akan semakin mempertegas dan memperkuat mesin politik Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya pada periode kedua di 2019.

Simpulan

Pada akhirnya, penelitian ini berkesimpulan tentang dua hal utama. Pertama, pemerintahan Joko Widodo secara politik telah sukses membangun kepercayaan publik dengan pembuktian kinerja di sektor pendidikan. Asumsi ini dibangun dari data hasil penelitian yang mayoritas menganggap bahwa kinerja di bidang pendidikan oleh pemerintahan Joko Widodo bekerja dengan baik. Penilaian publik yang positif terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo sekaligus mempertegas tentang trend positif kepuasan publik kepada Joko Widodo.

Kedua, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo khususnya di sektor pendidikan bukan tanpa resiko. Munculnya konstruksi politik lain yang sedang dibangun calon lawan politik sudah sangat cerdas dibaca oleh Jokowi untuk menentukan keputusan politiknya di masa yang akan datang. Di sisi lain, manajemen politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bagian dari membangun dan mempertahankan kekuatan politik menuju Pemilihan Presiden secara langsung di tahun 2019. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan besar bahwa ada semacam benteng politik yang sedang diperkokoh oleh Joko Widodo untuk mempertahankan popularitas dan akseptabilitas politiknya sebagai pemegang kendali atas roda pemerintahan. Pemilu presiden tahun 2019 akan menjadi pertarungan yang sangat keras dengan munculnya dinasti Yudhoyono generasi baru dan sentiman etnis yang sudah terbentuk dari waktu penelitian ini dilakukan.

Daftar Pustaka

- Chandler, M. (1988). Models of Voting Behavior in Survey Research. *Synthese, Vol. 76, No. 1 (July, 1988)* , 25-48.
- Cole, R. L. (1973). Toward as Model of Political Trust: A Causal Analysis. *American Journal of Political Science, Vol. 17, No. 4 (Nov., 1973)* , 809-817.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Eulau, H. (1956). Identification With Class and Political Role Behavior. *The Public Opinion Quarterly, Vol 20, No. 3* , 515-529.
- Hetherington, M. J., & Rudolph, T. J. (2008). Priming, Performance, and the Dynamics of Political Trust. *The Journal of Politics, Vol. 70, No. 2 (Apr., 2008)* , 498-512.
- Houghton, D. P. (2009). *Political Psychology Situations, Individuals, and Cases*. New York: Routledge.
- Mair, P. (2006). Cleavages. In R. S. Katz, & W. Crotty, *Handbook of Party Politics* (pp. 371-375). London: Sage Publications Ltd.
- Manis, J. G., & Stine, L. C. (1959). Suburban Residence and Political Behavior. *The Public Opinion Quarterly, Vol. 22, No. 4* , 483-489.
- Oszlak, O. (2005). State Bureucracy Politics and Policies. In T. Janoski, R. Alford, A. Hicks, & M. A. Schwartz, *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization* (pp. 482-505). Cambridge: Cambridge University Press.
- Rozell, M. J. (2009). The Religious Right in American Politics. In D. W. Johnson, *Routledge Handbook of Political Management* (pp. 240-252). New York: Routledge.
- Schoen, H., & Schumann, S. (2007). Personality Traits, Partisan Attitudes, and Voting Behavior: Evidence from Germany. *Political Psychology, Vol. 28, No. 4 (August 2007)* , 471-498.
- Schwartz, M. A., & Lawson, K. (2005). Political Parties: Social Bases, Organization, and Environment. In T. Janoski, R. Alford, A. Hicks, & M. A. Schwartz, *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization*. (pp. 266-286). Cambridge: Cambridge University Press.

Vigoda-Gadot, E. (2007). Citizens' Perceptions of Politics and Ethics in Public Administration: A Five-Year National Study. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 17, No. 2 (Apr., 2007) , 285-305.